

Perilaku Politik Masyarakat di Tujuh Kota Indonesia (Zulrizka Iskandar)

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI TUJUH KOTA INDONESIA

Zulrizka Iskandar
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Bandung 40600

ABSTRAK

Konflik politik sejak tumbangnya orde baru yang digantikan dengan era reformasi sampai sekarang tidak kunjung selesai. Berbagai lontaran pernyataan dari satu pihak kepada pihak yang lain terus berlangsung. Pernyataan-pernyataan elit politik yang menghiasi surat kabar hampir setiap hari dijumpai. Kondisi tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang setiap hari dibanjiri oleh informasi konflik politik, dan membentuk "*negative public mood*". Masyarakat mau tidak mau akan menganalisis peristiwa dengan caranya sendiri sebagai hasilnya mereka akan bersikap dan berperilaku politik terhadap stimulasi politik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini meliputi kota-kota : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makasar (Ujung Pandang). Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling, meliputi unsur-unsur yang ada di masyarakat, yaitu : Mahasiswa, Cendekiawan, Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan swasta, Pengusaha, Pedagang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum lainnya. Berbagai konflik politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan masyarakat sulit untuk menentukan sikapnya terhadap partai politik yang ada sekarang. Sikap masyarakat terbagi ke dalam berbagai kelompok partai politik. Dengan kondisi demikian, tidak adapartai politik yang dominan, dan kemungkinan adanya peningkatan pada perilaku politik masyarakat yang tidak memihak kemabapun juga.

Kata kunci : Perilaku politik, elit politik, konflik politik, dan quota sampling

POLITICAL BEHAVIOR OF COMMUNITIES IN SEVEN CITIES IN INDONESIA**ABSTRACT**

Since new order was collapsed and changed into reformation era, political conflicts still happen. Every political statement leveled accusation from one side to the other side. Statements from the political elites are always cited by newspapers and the community who is influenced by this information of political conflicts create a negative public mood. The community analyzes the information regarding the political conflicts using their own way of thinking, and the result is the attitude formation towards the political parties and their behaviors toward political stimulations. The research method in this study is descriptive method. The research samples are taken from the community in seven cities, i.e. Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, and Makasar. The quota sampling

technique was used in this study. Characteristics of the sample are : University Students, Educated People, Civil Servants, Private Employees, Entrepreneurs, Traders, Religious Leaders, Informal Leaders, and members of other different groups. Political conflicts in Indonesia are influencing the community, in such a way that they feel difficult to determine their attitudes towards the political parties. The community splits in to various political parties. Therefore, none of those political parties will again obtain majority votes, and it is possible that the number of people who are not participating in the 2004 election will increase.

Key word : Political behavior, Political elites, Political conflicts and Quota

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada tahun-tahun terakhir ini kehidupan politik di Indonesia nampaknya seperti tidak menentu. Para tokoh politik sering memberikan berbagai kemontaran dan pernyataan yang membingungkan rakyat, sehingga ditangkap oleh masyarakat sebagai adanya konflik antar elit politik. Pada awalnya diharapkan akhir konflik antar elit politik tersebut adalah bergantinya pemerintahan. Namun demikian, konflik politik tersebut masih belum selesai, bahkan menyebar ke dalam tubuh partai politik tersebut. Bagi masyarakat, pergantian pimpinan atau pemerintahan bukanlah berarti selesai segalanya. Masyarakat masih melihat adanya lontaran-lontaran bola politik yang tidak jelas arahnya, walaupun bentuknya berbeda dengan permasalahan yang lalu.

Peristiwa 11 September 2001 merupakan masalah internasional yang memberikan dampak politik pada kehidupan masyarakat. Berbagai tuntutan dari demonstran kepada pemerintahan baru adalah untuk memutuskan hubungan diplomatic dengan Amerika. Pemerintahan baru yang memiliki hubungan kuat dengan partai-partai tertentu mendapatkan ujian untuk menentukan sikapnya. Isu internasional ini pun dapat digunakan sebagai komoditi politik bagi kelompok tertentu, sehingga bola politik yang liar ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kondisi demikian sudah barang tentu akan membingungkan masyarakat. Namun demikian, isu politik yang belum terselesaikan pada bangsa Indonesia adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dikenal dengan KKN. Sasaran politik isu ini lebih jelas, yaitu adanya usaha untuk mengkaitkan dan menghabiskan sisa-sisa kekuatan yang memiliki kaitan dengan orde baru sehingga di masa mendatang pesaing politiknya akan berkurang. Namun demikian, untuk menghabisi suatu kekuatan politik tidaklah mudah, karena setiap partai politik yang mempunyai kursi di DPR, mempunyai pendukung.

Tahun 2004 dalam kehidupan politik bukanlah waktu yang lama. Namun demikian, dinamika kehidupan politik sampai dengan tahun 2004 dapat berubah-ubah secara dinamis. Walaupun perubahan-perubahan terjadi dalam dinamika politik, tetapi di tahun-tahun sebelumnya pola perubahannya masih dapat diikuti.

Pada saat ini berbagai partai politik yang mengecewakan masyarakat pemilihnya yang terdahulu. Ada pula partai politik yang terkena konflik internal, sehingga membingungkan masyarakat yang simpati kepadanya, tokoh mana yang akan dipercaya? Demikian pula dengan partai yang tidak berbuat banyak setelah mendapatkan kursi di DPR, sehingga masyarakat pemilihnya merasa kecewa. Dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan politik pada masyarakat dan partai politik, maka tahun 2004 merupakan suatu pertanyaan besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Oleh karenanya sangatlah menarik apabila diteliti bagaimana perilaku politik masyarakat sebenarnya terhadap partai politik di Indonesia?

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang partai-partai politik yang ada di Indonesia?
2. Bagaimanakah kecenderungan perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya?

TUJUAN TEORI

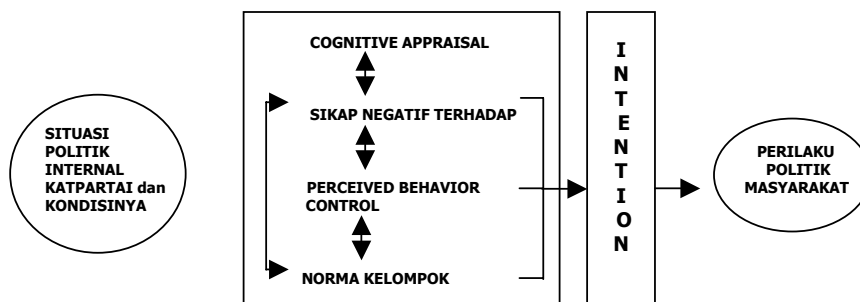
Situasi politik pada saat sekarang diwarnai oleh berbagai peristiwa yang menimbulkan kegoncangan di beberapa partai politik, seperti misalnya perpecahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Golongan Karya (PG), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kegoncangan di partai politik tersebut akan dipersepsi oleh masyarakat dan kemudian melakukan penilaian kognitif (*cognitive appraisal*). Elit politik dengan menggunakan gaya demokrasi liberal mengungkapkan berbagai pernyataan. Pernyataan yang simpang siur menimbulkan kebingungan pada kognitif masyarakat. Penilaian kognitif yang dilakukan masyarakat berbeda-beda, karena adanya perbedaan individu dan kelompok (Lazarus; 1984). Konflik internal yang terjadi pada partai politik sudah barang tentu akan di maknakan negatif oleh kognitif individu dan masyarakat. Konflik internal dari elit partai akan semakin parah akibatnya apabila tokoh politik tersebut kembali kepada kelompoknya, sehingga akan terjadi bela membela pada tahap irasional. Apabila kondisi demikian tertularkan pada masyarakat, dan masyarakat terpengaruh, maka konflik akan meluas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kematangan masyarakat dalam berpolitik.

Makna negatif pada masyarakat akan berkembang menjadi suatu. Hal ini dikarenakan adanya penilaian kognitif yang relatif konsisten dengan pembentukan sikap. Individu sebagai anggota masyarakat akan mengembangkan sikap negatifnya terhadap partai politik yang mengecewakan dirinya, atau dengan kata lain, sikap negatif tersebut akan ditujukan pada objek yang menghambat pencapaian tujuan politiknya atau referensi politik yang dimilikinya. Sikap negatif

akan mempengaruhi evaluasi politiknya, yang meliputi isu politik yang terjadi dan untuk kondisi pemilihan umum di Indonesia yang masih memilih partai, maka citra partai tersebut akan berpengaruh, atasu apabila akan dilakukan pemilihan langsung, maka tokoh partai tersebutlah yang akan menjadi objek negatifnya. Hal ini akan menimbulkan berkurangnya kepercayaan (*lack of trust*) seseorang pada partai-partai tersebut (Huntington; 1997).

Masyarakat Indonesia yang mempunyai kecenderungan kolektif, memberikan reaksi terhadap konflik yang terjadi pada partai-partai tersebut sebagai "*negative public mood*" (pengalaman perasaan yang negatif dalam kehidupan politik setiap harinya). Dengan demikian, akan terjadi interaksi dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap negatif terhadap partai-partai politik tersebut. "*Negative public mood*" yang berkelanjutan akan membentuk suatu norma kelompok dan "*perceived behavior control*" (kendali perilaku yang diamati pada masyarakat) menyatakan bahwa masyarakat lain menyetujui sikap negatif tersebut. Sebagai hasil dari kondisi psikologis tersebut maka akan terjadi kecenderungan dalam berperilaku.

Konflik politik yang terjadi akan menimbulkan instabilitas dari pemilih ataupun simpatisannya (Berelson, Lazarsfelds, dan McPhee, 1954 dalam Linzey 1969). Sebagai akibatnya maka akan terjadi perubahan dalam jumlah pemilih partai tersebut, atau dengan perkataan lain, pemilih suatu partai pada pemilu yang lalu, dengan kondisi konflik akan mengalihkan suaranya ke partai lain atau mungkin tidak memilih salah satu partaipun. Kondisi demikian sudah barang tentu akan merugikan partai politik tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini.



BAGAN : Perilaku Politik Masyarakat terhadap Situasi Konflik Internal Partai

Citra partai sudah barang tentu tidak saja dinilai oleh masyarakat dalam kaitannya dengan konflik internal partai. Namun demikian, kondisi partai akan mempengaruhi citra partai. Hal ini berarti adanya berbagai kejadian di dalam tubuh partai tersebut, akan mempengaruhi pula citra partai, seperti misalnya dugaan adanya KKN, dan isu KKN pada saat ini merupakan isu yang negatif bagi masyarakat. Isu ini akan merugikan pada citra partai. Dengan demikian, isu

tersebut akan mempengaruhi pula pada perolehan suara partai. Apabila dilihat dari kondisi partai-partai saat ini, maka permasalahan internal partai nampaknya akan mempengaruhi perolehan suara masa mendatang. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pada pemilu perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya akan tersebar. Atau dengan perkataan lain, tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif tentang kondisi kehidupan politik masyarakat, yaitu sikap masyarakat tentang partai politik. Dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang kondisi partai politik di masyarakat, demikian pula dengan konstelasinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, di 7 kota besar di Indonesia.

Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, maka teknik pengamilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner dan inerview. Adapun kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan rating scale, dan data yang diperoleh melalui kuesioner adalah data ordinal. Selain melalui kuesioner diperlukan pula data melalui interview yang terstruktur. Dengan demikian gambaran atau deskripsi tentang kondisipartai politik dapat lebih tergambarkan dengan baik.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah :

- a. Sikap masyarakat terhadap citra partai politik
- b. Sikap masyarakat terhadap pimpinan partai politik
- c. Persepsi masyarakat tentang tingkat kepercayaan pada partai politik.

Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik quota sampling digunakan karena bertujuan untuk melakukan deskripsi terhadap sampel yang ada di masyarakat, dan didasarkan pada kategori masyarakat yang akan dijadikan sampel. Adapun sampel diambil dari berbagai kategori yang terdapat di masyarakat, yaitu :

1. Cendekiawan/dosen/pengamat politik
2. Mahasiswa PTN dan PTS
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat : Pemuda, Ormas, LSM.
5. Pegawai swasta
6. Pegawai Negeri

7. Pengusaha
8. Pedagang
9. Masyarakat umum seperti : Buruh, Sopir taksi, Pengemudi becak, Pedagang kakilima, dan Ibu rumah tangga.

Kota-kota di luar P. Jawa, karena populasinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan kota-kota besar di P. Jawa, maka jumlah sampel di kota-kota di pulau Jawa adalah 100 orang, jumlah sampel di kota-kota di pulau Jawa adalah 200 orang. Dengan demikian, jumlah total sampel penelitian ini adalah 1.100 orang.

Adapun kota besar yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Teknik Analisis

Untuk dapat melakukan deskripsi dari hasil penelitian ini, dan berdasarkan teknik sampling yang tidak random, maka teknik analisis yang digunakan adalah persentase. Hal ini berarti bahwa perhitungannya berdasarkan kecenderungan jumlah atau frekuensi jawaban yang dipilih oleh responden. Penyajian data tersebut disampaikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai persentase.

HASIL dan PEMBAHASAN

Citra partai berdasarkan hasil evaluasi masyarakat pada umumnya meragukan, Hal ini berarti bahwa tidak ada satupun partai yang dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Citra partai di kota-kota daerah penelitian

KATEGORI	PDIP	GOLKAR	PPP	PKB	PAN	PBB
Sangat baik	44,02 %	13,01 %	38,19 %	19,46 %	42,77 %	32,99 %
Ragu-ragu	44,64 %	37,25 %	53,60 %	55,88 %	49,32 %	57,86 %
Buruk	11,34 %	49,74 %	8,21 %	24,66 %	7,91 %	9,15 %

Citra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan pada saat ini, dan merupakan partai pemenang pemilu 1999, adalah meragukan (44,64 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai PDIP sebagai partai belum dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. Citra partai yang belum dinilai secara baik oleh masyarakat tersebut dimungkinkan karena adanya berbagai gejolak yang terjadi di tubuh PDIP. Dengan kondisi tersebut, masyarakat menjadi ragu terhadap PDIP. Kondisi demikian dapat berubah sampai dengan tahun 2004, apabila pemerintah menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, maka citranya akan lebih menurun lagi. Dengan perkataan lain, masyarakat yang menilai citra PDIP pada saat ini sangat baik (44,02 %) akan menurun lagi persentasenya. Namun demikian, apabila dalam waktu yang tersisa, PDIP dapat menunjukkan kinerjanya

sebagai partai yang dapat memuaskan masyarakat, maka citranya akan meningkat. Masyarakat yang menilai citra PDIP sangat baik dalam penelitian ini adalah masyarakat Makasar 46,3 %; Medan 50,7 %; Palembang 51,0 %; dan Yogyakarta 52,0 %.

Citra partai Golkar dalam penelitian ini mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat (49,74 %). Kondisi demikian sudah barang tentu merugikan bagi partai Golkar yang merupakan partai pemenang pemilu 1999. Penilaian masyarakat ini sangatlah terkait dengan keadaan personil partai yang berurusan dengan hukum yaitu masalah KKN (82,93 % masyarakat Jakarta dan 56,25 % masyarakat Makasar menilai adanya dugaan keterlibatan KKN pada partai Golkar), seperti misalnya kasus Bank Bali, kasus Freeport, kasus dana non budgeter BULOG. Isue KKN pada saat ini merupakan "*Negative public mood*". Selain itu pula, personil Partai Golkar masih sering dikaitkan dengan rwzim orde baru. Walaupun pada waktu pemilu yang lalu telah dinyatakan bahwa Golkar yang sekarang adalah Partai Golkar baru, tetapi upaya menghapuskan kesan negatif pada kognitif masyarakat tidaklah mudah. Namun demikian, masyarakat di Makasar masih ada yang menilai citra Partai Golkar adalah sangat baik (55,0 %). Hal ini dimungkinkan karena pada waktu lalu kota Makasar merupakan kantong suara Golkar.

Citra Partai Persatuan Pembangunan dinilai oleh masyarakat meragukan (53,60 %). Hanya 38,19 % masyarakat menilai citra PPP sangat baik. Dengan adanya konflik internal yang terjadi di tubuh PPP, maka citranya akan semakin menurun. Perolehan suara yang akan diperebutkan pada tahun 2004 akan semakin menurun, karena adanya perpecahan partai, yaitu menjadi PPP dan PPP-reformasi. Sebagai partai yang berbasiskan agama Islam, maka kekuatan ulama-ulama akan menjadi tumpuan partai dalam persaingan tersebut. Pada waktu penelitian ini dilakukan yaitu bulan November-Desember 2001, belum muncul deklarasi PPP-reformasi, sehingga konstelasi penilaian terhadap PPP tentunya akan berubah. Perpecahan yang terjadi di dalam PPP sangatlah merugikan partai tersebut. Namun demikian di makasar ada sejumlah masyarakat yang menilai PPP sangat baik yaitu sejumlah 46,30%, demikian pula dengan masyarakat di kota Medan sejumlah 57,5 % masih menilai PPP sangat baik. Sebagaimana diketahui di budaya pesantren yang merupakan akar kekuatan dari suara partai yang berbasis agama Islam akan sangat ditentukan oleh ulama-ulama yang memegang pondok pesantren tersebut. Namun demikian masyarakat yang beragama Islam tidak terikat pada kehidupan pondok pesantren merupakan massa yang diperebutkan oleh berbagai partai yang berbasiskan Islam. Pada umumnya masyarakat di daerah penelitian menilai diragukan, hanya masyarakat di kota Makasar sebanyak 48,8% menilai PPP mampu menyelesaikan konflik internal. Pada kondisi sekarang telah terjadi perpecahan tersebut, dan perpecahan tersebut terjadipula di berbagai daerah. Oleh karena itu, PPP pada pemilu tahun 2004 diasumsikan akan menghadapi masalah yang cukup berat, terutama dalam mendapatkan perolehan suara yang lebih banyak dibanding pemilu yang lalu.

Citra Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai oleh masyarakat pada umumnya meragukan (55,88%). Konflik internal PKB yang telah berlangsung

sejak masa berakhirnya pemerintahan Gus Dur terus meruncing dan berakhir dengan adanya dua PKB, PKB yang dipimpin oleh Matori Abdul Jalil dan PKB yang dipimpin oleh Alwi Shihab. 24,66% masyarakat menilai citra PKB buruk. Citra PKB yang kurang baik ini selain diakibatkan oleh konflik internal, disebabkan pula oleh jatuhnya Presiden Gus Dur dari tampuk pemerintahan, sehingga masyarakat menilai ragu-ragu terhadap PKB. Bahkan masyarakat di kota Makasar menilai citra PKB buruk 53,80%. Hal ini dapatlah dimengerti, karena PKB memiliki basis massa Nahdatul Ulama yang sebagian kekuatannya berada di Propinsi Jawa Timur, sedangkan di daerah Sulawesi Selatan nampaknya kurang mempunyai akar yang kuat. Dalam hal kemampuan mengatasi konflik internal, masyarakat menilai ragu-ragu tentang kemampuan PKB dalam menyelesaikannya. Masyarakat Surabaya meragukan kemampuan PKB mengatasi masalah konflik internal. Hal ini terlihat dengan adanya dua Munaslub yang diselenggarakan oleh pimpinan PKB yang berbeda, di bulan Januari 2002. Dengan kondisi demikian, nampaknya PKB akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan partai-partai lain dalam memperoleh suara pada pemilu 2004.

Citra Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai oleh masyarakat pada posisi yang meragukan (49,32%). Sebagian masyarakat menilai citra PAN sangat baik (42,77%). Apabila melihat konfigurasi antara masyarakat yang menilai citra PAN meragukan dan yang menilai sangat baik hampir berimbang. Kondisi demikian, dikarenakan konflik internal yang terjadi di dalam tubuh PAN telah "diselesaikan" ketika Presiden Abdurachman Wahid masih berkuasa. Sejumlah masyarakat (30,28%) menilai PAN mampu mengatasi konflik internal, tetapi sebagian besar (55,46%) meragukannya. Apabila melihat secara sepintas kondisi PAN nampaknya masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi internal partai yang lainnya. Kondisi demikian mungkin akan menguntungkan PAN dalam menghadapi pemilu 2004. Hal ini tentunya dengan catatan apabila pada tahun-tahun mendatang tidak terdapat masalah dengan kondisi internal partai. Situasi politik dapat berubah dengan cepat, oleh karenanya kewaspadaan dari pengurus partai sangatlah diperlukan.

Citra Partai Bulan Bintang (PBB) pada saat ini adalah dalam posisi yang meragukan (57,86%). Yang menilai citra PBB sangat baik berjumlah 32,99%. Keraguan masyarakat dalam menilai citra PBB dapatlah dimengerti karena di dalam tubuh PBB masih ada konflik yang terjadi. Namun demikian, walaupun mempunyai potensi untuk terjadi perpecahan, tetapi PBB tidak menunjukkan konflik internalnya ke dunia luar, seperti yang terjadi pada PPP dan PKB. Masyarakat umumnya meragukan kemampuan PBB dalam mengatasi konflik internal partai (60,87%). Kondisi demikian dapat terjadi karena perolehan suara ketika pemilu 1999 adalah tidak sebesar partai lainnya, sehingga resonansi permasalahan yang terjadi di tubuh PBB tidak terlampau berimbas kepada masyarakat. Kondisi demikian sudah barang tentu merupakan rumah bagi pengurus PBB dalam menghadapi pemilu 2004.

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya bahwa perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya mengalami kebingungan. Hal ini dikarenakan partai yang pada pemilu lalu menjadi pilihannya, pada saat sekarang terjadi konflik

dalam tubuh partai tersebut. Dari hasil interview didapatkan bahwa pemilihan masyarakat dalam menentukan partai yang dianggap dapat mewakili aspirasinya sebagian masih dipengaruhi oleh tokoh partainya, dan mengharapkan adanya perubahan yang membaik, serta tidak terlibat dalam KKN. Partai-partai yang dahulu dipilihnya, kini mengalami permasalahan dalam tubuh partainya, sehingga masyarakat akan mengalami kebingungan dalam memilih, apabila kondisi demikian tidak segera diatasi. Apabila kondisi ketidakjelasan ini terus berlanjut sampai tahun 2004, masyarakat tidak memperoleh pendidikan politik yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat menentukan pilihannya dengan baik, sehingga berbagai kemungkinan akan terjadi, yaitu antara lain, meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak mengikuti pemilu karena apatis, atau mengikuti pemilu hanya asal berpartisipasi. Oleh karena itu partai-partai peserta pemilu mendatang mempunyai "pekerjaan rumah" yang cukup banyak, apabila ingin mensukseskan kegiatan pemilu sebagai sarana bagi masyarakat dalam berperilaku politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada partai yang dominan dalam mendapatkan suara pada pemilu mendatang. Atau dengan kata lain, tidak dijumpai "*single majority*". Bahkan dapat terjadi penurunan perolehan suaranya. Hal ini dikarenakan situasi partai yang ada pada saat sekarang. Waktu yang tersisa menghadapi pemilu mendatang tidaklah lama, dan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap partai mudah. Perubahan iklim politik perlu segera diupayakan oleh berbagai partai politik, sehingga tidak terjadi "*negative public mood*". Berbagai peristiwa yang membuat masyarakat kecewa, tidak akan mendukung perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, situasi politik yang kondusif harus segera diciptakan oleh seluruh pihak dan partai politik. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pilihannya dengan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Partai politik yang ada sekarang di Indonesia masih meragukan bagi masyarakat kota di daerah penelitian. Masyarakat masih belum dapat menilai citra partai politik sebagai sangat baik. Kognisi masyarakat dalam hal ini masih meragukan citra dari partai politik tersebut dikarenakan oleh berbagai hal, seperti misalnya konflik internal dan adanya dugaan keterlibatan dalam kasus-kasus yang tidak menguntungkan citra partai, sehingga pada akhirnya memberikan citra yang meragukan.
2. Adanya "*negative public mood*" karena masyarakat menghadapi berbagai macam krisis yang tidak selesai yang mempengaruhi iklim politik di Indonesia, Berbagai masalah yang dihadapi partai terungkap pada publik, dan membentuk norma sosial, yang pada akhirnya memberikan pembenaran pada masyarakat dalam menilai citra partai politik.

3. perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya, pada saat sekarang dalam posisi yang tidak jelas. Hal ini disebabkan masyarakat dibuat bingung oleh adanya berbagai konflik yang terjadi di partai politik, yang mengakibatkan terjadi perpecahan ditubuh partai politik tersebut.
4. Perolehan suara pada pemilu 2004, diprediksikan tidak akan ada partai yang memperoleh suara terbanyak atau "*single majority*". Kondisi masyarakat yang pada akhir-akhir ini banyak mengalami "*negative public mood*" dapat mengalami kejenuhan akibat konflik tersebut, dan pada akhirnya dapat mengalami kekecewaan masyarakat terhadap partai yang dipilihnya pada masa lalu, akan memunculkan kecenderungan tidak berpartisipasi dalam pemilu,
5. Partai-partai yang berdasarkan agama Islam sedang mengalami konflik internal. Hal ini akan mempengaruhi perolehan suara di pemilu sekarang.

Saran

1. Elit politik dan pemerintah perlu menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat agar "*negative public mood*" pada masyarakat tidak berkembang menjadi perilaku yang apatis.
2. Perlu adanya suatu penciptaan suasana politik yang kondusif oleh partai-partai politik. Partai politik perlu bekerja keras dalam menghadapi pemilu mendatang
3. Penelitian yang serupa ini perlu dilakukan lagi, pada saat menjelang pemilu 2004. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan perilaku politik masyarakat di kota-kota di daerah penelitian dapat diikuti secara seksama, sehingga pada akhirnya akan menambah khasanah keilmuan, khususnya ilmu psikologi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hofstede, Geert 1997 **Cultures and Organizations Software of the Mind, Intercultural Cooperation and its importance for survival.** McGraw Hill, New York
- Huntington, Samuel P. 1998 **The Clash of Civilization and the Remaking of World Order.** Simon & Schuster, London
- Kim, Mochol et. al. 1994 **Individualism and Collectivism, Thoery, Metod, and Aplication.** Sage, California
- Krech, David., et. al. 1962 **Individual in Society.** McGraw Hill Kogakusha, Tokyo
- Lazarus, Richard S., and Folkman, Susan 1984 **Stress, Appraisal, and Coping,** Springer Publishing Company, New York.
- Sears, David O. 1969 **Political Behavior.** Dalam Buku Lindzey, Gardner dan Aronson, Eliot. **The Handbook of Social Psychology.** Amarind Publishing, New Delhi.
- Tesser, Abraham 1995. **Advanced Social Psychology.** McGraw Hill, New York.
- Touraine, Alain 2000. **Can We Live Together ? quality and Difference.** Polity Press Cambridge.
- Wiggins, James A. et. al. 1994 **Social Psychology.** Fifth Edition McGraw Hill New York.

Jurnal :

- Feillerd, Andree. **Lokal vs Universal (Apa Arti Pembangunan Agama di Indonesia)** Dialektika, Jurnal Sosial Politik Vol. 2 No. 1 2001.
- Rahn, Wendy M. et.al. **A Frame Work for Study of Public Mood.** Journal of the International Society of Political Psychology. Vol. 17 No. 1 March 1966 Blackwell.

Makalah :

- Imam B Prasodjo 2000. **Perilaku Elit Politik dan Ancaman Disintegrasi Bangsa.**
- Zulriska Iskandar. 2000 **Cinta Bangsa sebagai Sumber Motivasi Perilaku Bernegara Bangsa Indonesia dan Penyimpangannya.**